

## **Menjelajahi Konsep Pembangunan Ekonomi dalam Perkembangan Kontemporer: Millenium Development Goals**

**Ibnu Aithan <sup>1</sup>, Lince magriasti <sup>2</sup>**  
Universitas Negeri Padang  
e-mail: [ibnuaitan25@gmail.com](mailto:ibnuaitan25@gmail.com) <sup>1</sup>

**Abstrak** – Sering disebut sebagai tolak ukur utama untuk menentukan kemajuan mana dalam upaya pembangunan global, Tujuan Pembangunan Milenium. Pada saat yang sama, sasaran akan tercapai pada tahun 2015, atau akan tercapai pada tahun yang sama. Makalah ini dibangun berdasarkan diskusi yang telah mulai membahas metode-pendekatan potensial, tujuan, dan indikator sasaran untuk membantu menginformasikan proses pengembangan Millennium Development Goals. Artikel ini menguraikan bidang-bidang tujuan potensial berdasarkan Deklarasi Milenium awal, kerangka waktu untuk setiap Millenium Development Goals, dan upaya untuk menghitung beberapa target yang masuk akal terkait desain. Kemiskinan telah lama menjadi subjek diskusi internasional. Paradigma neoliberal menekankan penyesuaian struktural sebagai solusi. Namun, metode ini gagal mengatasi kemiskinan global karena kesalahan dalam menganggap kemiskinan sebagai masalah. Oleh karena itu, Millennium Development Goals (MDGs) muncul sebagai revolusi gagasan sekaligus revolusi tata kelola kemiskinan di seluruh dunia. Pandangan kosmopolitanisme digunakan dalam analisis Millennium Development Goals (MDGs). Dalam tulisan ini, kemiskinan dipandang tidak lagi sebagai masalah nasional, tetapi sebagai masalah global, di mana setiap negara, baik kaya maupun miskin, bertanggung jawab untuk memerangi kemiskinan di seluruh dunia. Semangat kosmopolitan ditunjukkan oleh solidaritas nasional. MDGs menunjukkan sikap altruistik negara. Proses ini sangat penting untuk memahami bahwa kemiskinan adalah masalah yang harus ditangani oleh semua negara.

**Kata Kunci:** MDGs, tata-kelola global, kemiskinan, kosmopolitanisme, norma.

***Abstract** – Often cited as the primary benchmark for determining progress in global development efforts, the Millennium Development Goals. At the same time, the goal will be achieved in 2015, or will be achieved in the same year. This paper builds on discussions that have begun to address potential approaches, objectives, and target indicators to help inform the Millennium Development Goals development process. This article outlines potential goal areas based on the original Millennium Declaration, time frames for each Millennium Development Goal, and attempts to quantify some reasonable targets related to design. Poverty has long been a subject of international discussion. The neoliberal paradigm emphasizes structural adjustment as a solution. However, this method fails to address global poverty due to the error of considering poverty as a problem. Therefore, the Millennium Development Goals (MDGs) emerged as a revolution in ideas as well as a revolution in poverty governance throughout the world. The cosmopolitanism view is used in the analysis of the Millennium Development Goals (MDGs). In this paper, poverty is seen no longer as a national problem, but as a global problem, where every country, both rich and poor, is responsible for fighting poverty throughout the world. The cosmopolitan spirit is demonstrated by national solidarity. MDGs show the country's altruistic attitude. This process is very important to understand that poverty is a problem that must be addressed by all countries.*

***Keywords:** MDGs, global governance, poverty, cosmopolitanism, norms.*

## PENDAHULUAN

Pada bulan September 2000, pertemuan terbesar kepala negara dan pemerintahan di PBB—dengan 147 di antaranya—mengadopsi Deklarasi Milenium, yang menetapkan tujuh tujuan pembangunan internasional untuk dicapai pada tahun 2015. Sebagian besar orang menganggap Deklarasi Millennium Kedelapan sebagai tolak ukur utama untuk menentukan kemajuan apa yang telah dicapai dalam upaya pembangunan internasional. Millennium Development Goals (MDGs) telah berhasil mendorong tindakan dan perubahan selama sepuluh tahun terakhir, seperti yang dibahas dalam makalah saudara (Kenny & Sumner, 2011).

Sama sekali tidak jelas apakah tujuan tahun 2015 akan tercapai atau tidak. Pada tahun 2016, kemampuannya untuk memotivasi akan sangat terbatas, dan mungkin sudah berkurang. Selain itu, sejumlah besar penelitian baru menunjukkan bahwa tujuan tersebut seharusnya dirancang untuk menetapkan sasaran pembangunan yang lebih masuk akal (Khairina et al., 2020).

Tidak lama lagi, tujuan baru dan target yang belum terukur akan diusulkan. Agenda Millennium Development Goals (MDGs) saat ini adalah hasil dari konferensi PBB selama sepuluh tahun. Banyak dari tujuan ini tidak akan terwujud dalam putaran kedua jika dimulai pada tahun 2015.

Selain itu, dokumen hasil KTT MDG bulan September 2010 meminta Sekretaris Umum PBB untuk memulai konsultasi tentang apa yang akan terjadi setelah tahun 2015, dan untuk menyarankan "langkah lebih lanjut untuk memajukan agenda pembangunan PBB lebih jauh lagi 2015" dalam laporan tahunannya (UNGA, 2010 hal. 29).

Setiap percakapan menimbulkan pertanyaan tentang cara menetapkan tujuan dan tujuan. Tujuan Pembangunan Internasional (MDGs dikurangi Tujuan Kedelapan) dibuat oleh laporan OECD DAC, *Shaping the 21st Century: The Contributions of Cooperation in Development*, yang diterbitkan pada bulan Mei 1996. Laporan ini menciptakan Tujuan Pembangunan Internasional, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk berbagai konferensi pembangunan internasional. Selain itu, tujuan telah disempurnakan melalui pertemuan yang disponsori oleh OECD, PBB, dan Bank Dunia. Selain itu, 21 indikator kemajuan telah diidentifikasi (Manning, 2009).

Menjelang tahun 2015, ada seruan untuk menerapkan metode yang lebih berpartisipasi. Misalnya, "Hal-Hal Penting yang Harus Dimiliki untuk Kerangka Pembangunan Global" menggabungkan topik penting dalam "Hal-Hal Penting yang Harus Dimiliki untuk Kerangka Pembangunan Global" (4). Hal-hal ini menyarankan bahwa pengganti MDG harus dibuat secara partisipatif dan inklusif, dengan fokus untuk melibatkan kelompok dan masyarakat yang terpinggirkan yang terkena dampak kemiskinan dan ketidakadilan.

Banyak prinsip dan proposal akan muncul menjelang 2015. Salah satu pilihan untuk pendekatan ini adalah kerangka kerja yang berorientasi pada tujuan; namun, pendekatan ini juga dapat dibuat oleh pemerintah pusat melalui proses musyawarah. Untuk melakukannya, pemerintah pusat dapat menggabungkan sejumlah indikator global, seperti gizi anak, kematian bayi, dan angka kelulusan sekolah dasar dan menengah, dengan target dan indikator aktual yang ditetapkan melalui proses musyawarah. Dalam waktu dekat, pendekatan ini akan jauh lebih berani. Ini akan menghasilkan perjanjian global yang mengikat di utara dan selatan, dengan target kemiskinan di selatan dan konsumsi berkelanjutan di Utara.

Ini dapat berfokus pada barang publik global dan masalah global, seperti pembangunan ketahanan iklim dan kemiskinan ekstrem. Ini juga dapat berfokus pada dimensi pembangunan nasional di utara dan selatan, yang dikenal sebagai pendekatan "Satu Dunia" oleh Manning (2009) (lihat Sumner & Tiwari, 2011 untuk diskusi lebih lanjut). Masih ada

banyak cara yang dapat digunakan.

Beberapa di antaranya hanya diwakili sebagian dalam Millennium Development Goals (MDGs), dan beberapa di antaranya mungkin berusaha untuk mengatasi hal ini dalam perjanjian baru. Selain itu, kami berasumsi bahwa "MDGs baru" akan menjadi lebih global dan memiliki target "top down", tetapi mungkin akan lebih baik jika negara-negara memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan global melalui proses musyawarah nasional.

Ada kemungkinan bahwa makalah ini akan membahas tujuan dan target baru atau yang diubah, serta kerangka waktu dan alat untuk mencapainya, dengan mempertimbangkan peringatan bahwa proses yang inklusif diperlukan dan bahwa cakupan makalah ini terbatas.

## **METODE PENELITIAN**

Didalam penelitian untuk penulisan artikel ini, penulis memperoleh data data dari hasil riset penelitian dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Metode Pengamatan

Melalui metode ini penulis terjun langsung untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi di lapangan

2. Studi Pustaka

Penulis mempelajari beberapa buku, laporan, dan jurnal untuk melengkapi materi dalam penulisan artikel ini

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Seringkali, hubungan internasional digambarkan sebagai dunia yang anarki di mana setiap negara berjuang untuk kepentingan negaranya sendiri. Kecurigaan, kebohongan, suap-menyuap, ketidaksetiaan, kesombongan, penghianatan, eksploitasi, penjarahan, penindasan, penaklukan, genosida adalah beberapa contoh dari sejarah hubungan internasional (Cohen 1984, 299). Dalam situasi seperti ini, moralitas dianggap berbahaya bagi keuntungan bangsa.

Pemerintah adalah perwakilan bukan pemimpin yang bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan karena dorongan moral dari pengalaman masyarakat. Untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin, negara berusaha mencapai kepentingan nasionalnya dengan mengeksploitasi negara lain. Selama bertahun-tahun, perspektif realis tentang hubungan internasional mendominasi pemikiran. Sampai saat ini, sulit untuk menjelaskan hakekat dunia tanpa menyimpang dari kerangka pemikiran ini (Yusuf, 2018).

Menurut skeptisisme, tidak ada kerjasama internasional yang didasarkan pada solidaritas mekanis (*gemeinschaft*), yang didorong oleh altruisme. Baik liberal maupun neorealisme tetap percaya bahwa rasionalitas mendorong kerja sama. Dalam hal ini, kerjasama digunakan untuk mencapai hasil yang paling menguntungkan bagi negara. Tidak ada kewajiban yang mendorong solidaritas, tetapi kepentingan atau solidaritas organisatoris. Misalnya, negara berusaha untuk mempertahankan keamanan nasionalnya dengan bergabung dengan negara yang lebih kuat, yang menyebabkan aliansi dan bandwagoning (S. Sari, 2015).

Selain itu, kesamaan identitas kultural, ideologis, sejarah, dan lainnya adalah dasar solidaritas, menurut konstruktivis. Identitas kolektif ini menentukan siapa yang termasuk dalam "kelompok dalam" dan "kelompok luar" (Adler & Barnett 1998; Wendt 1999, 298-306). Konstruktivis terjebak dalam parokialisme, yang menganggap solidaritas internasional sebagai sesuatu yang eksklusif. Sebagai contoh, kesamaan kultural yang mengikat Uni Eropa menghalangi Turki untuk masuk. Kenyataan ini menunjukkan bahwa membangun solidaritas internasional yang inklusif yang berbasis pada kesetaraan dan kesamaan global sangat sulit. Pendapat bahwa solidaritas global tidak ada dibahas dalam studi kasus ini. Agenda

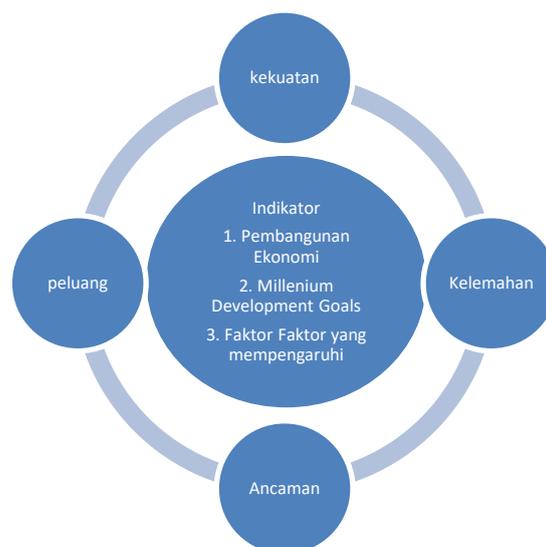
Pembangunan Millenium (MDGs) membantu masyarakat internasional bersatu untuk memerangi kemiskinan di negara-negara berkembang. Buku yang tersedia

Sangat sedikit yang dikatakan tentang hubungan antara Millennium Development Goals dan moral kosmopolitan. Dalam hal ini, konsep hak asasi manusia diperluas, dan tujuan Millennium Development Goals adalah untuk mengakhiri kemiskinan di seluruh dunia (Alston 2005; Nelson 2007; Andrews 2008). Selain itu, MDGs tidak bersifat global, menurut Saith (2006, 1184) dan Gore (2008), meskipun mereka didasarkan pada prinsip universal. Dengan demikian, masalah pembangunan cenderung terkonsentrasi di negara-negara dunia ketiga. Kritikus lain mengklaim bahwa tujuan Millennium Development Goals (MDGs) diatur secara "top-down" oleh IMF dan Bank Dunia secara rahasia.

Jadi, upaya global untuk memerangi kemiskinan hanyalah janji palsu (Bond 2006, 341). Tesis dasar tulisan ini, yang dibangun dengan menggunakan perspektif kosmopolitanisme dalam tradisi pemikiran hubungan internasional, adalah bahwa kemiskinan sekarang dipandang sebagai masalah global, bukan lagi masalah nasional, dan bahwa setiap negara, baik kaya maupun miskin, bertanggung jawab untuk memerangi kemiskinan di seluruh dunia. Dalam kasus ini, solidaritas antar bangsa menunjukkan adanya semangat global yang mengabaikan kepentingan jangka pendek pemerintah.

MDGs menunjukkan sikap altruistik negara. Pendapat tentang sistem internasional yang anarki tidak dihapus dari argumen ini. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menunjukkan bahwa moralitas tidak mustahil dalam dunia yang anarki (Rosyidin 2012). Dalam tulisan ini, konsep kosmopolitanisme digambarkan sebagai standar teoritis untuk hubungan internasional. Pada dasarnya, pendekatan kosmopolitanisme melibatkan perdebatan (intra-paradigm debate) tentang bagaimana menyelesaikan masalah global dengan menggunakan metode "top-down" atau "bottom-up".

Dalam tulisan ini, Millennium Development Goals (MDGs) digambarkan sebagai salah satu bentuk upaya untuk menyelesaikan masalah global melalui pendekatan "top-down". Penulis kemudian mengaitkan MDGs dengan kosmopolitanisme karena MDGs mencerminkan komitmen moral komunitas internasional terhadap masalah kemiskinan global melalui pendekatan kosmopolitranisme. Selain itu, itu menegaskan bahwa pembentukan tata kelola global adalah cara untuk menyelesaikan kemiskinan.



Model analisis SWOT menurut Drucker, Selznick dan Chandler dalam Quezadaz et al (2019), yakni a. Strength (Kekuatan), b. Weakness (Kelemahan), c.

Opportunities (Peluang), d. Threats (Ancaman) (R. Sari & Halim, 2022).

### 1. Strength (Kekuatan)

"Warga dunia", atau warga negara global, adalah kata yang dekat dengan kosmopolitanisme. Dalam situasi seperti ini, seseorang dapat mengidentifikasi dirinya tanpa mengacu pada identitas atau nasionalisme tertentu. Sekitar abad keempat sebelum masehi, gagasan tentang "warga dunia" muncul di Yunani, dan menjadi inti dari filosofi kosmopolitanisme. Ketika Yunani terpecah menjadi dua negara-kota, Athena dan Sparta, Diogenes adalah filsuf pertama yang menyebut istilah "warga dunia" (Indrayati, 2011).

Namun, menurut Linklater (2007, 109), ide itu sebenarnya hanya mencerminkan kritik Diogenes terhadap polisi Yunani, bukan keinginan untuk membangun komunitas global umat manusia. Namun demikian, dari gagasan Diogenes lahir gagasan tentang cara membangun dunia ideal yang melindungi hak-hak setiap orang secara bebas.

Teori dasar hubungan internasional didasarkan pada kosmopolitanisme. Dengan menawarkan solusi untuk kemungkinan transformasi global, kosmopolitanisme berkomitmen pada praktik hubungan internasional. Untuk merekonstruksi praktik hubungan internasional, politik dunia harus dipahami sebagai etika global yang mencakup prinsip moral yang inklusif (Cochran 2004, 2).

Kosmopolitanisme, seperti teori normatif lainnya, memandang dunia sebagai satu kesatuan di mana masalah yang dihadapi oleh satu negara dipandang oleh semua negara di dunia. Pada dasarnya, negara-negara gagal menyelesaikan masalah global saat ini karena mereka tidak pernah bergabung dengan sistem sosial keduniaan, atau planetary social system, (Miller 2006, 33).

### 2. Weakness (Kelemahan)

Negara terlalu sibuk dengan upaya untuk mencapai kepentingan nasional. Ketika suatu negara ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah global, tindakan tersebut merupakan hasil dari kalkulasi rasional. Kosmopolitanisme berupaya melepaskan negara dari "sangkar besi" kedaulatan dan relativisme kepentingan nasional. Semua pihak harus berempati dan saling membantu dalam menyelesaikan segala persoalan di dunia, karena persoalan di satu wilayah merupakan persoalan bersama.

Secara sederhana etika kosmopolitan dimaknai sebagai sikap moral, yang memandang bahwa semua individu mempunyai nilai dasar yang sama tentang konsep kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Meskipun pada dasarnya berbeda-beda, mulai dari fisik (ras), budaya (etnis), keyakinan (agama), pandangan hidup (filosofi dan ideologi), dan geografis (tempat tinggal). Martha Nussbaum (dalam Baban 2006, 105) menyatakan bahwa "Kita harus mengakui nilai kemanusiaan di manapun ia berada, menghormati dan mematuhi segala unsur-unsur dasarnya, serta kapasitas nalar dan moralnya".

Karena nilai kemanusiaan bersifat universal, maka semua pihak harus meletakkannya di atas nilai-nilai lain yang bersifat partikular atau parokial. Dengan konsekuensi batas-batas tradisional yang menegaskan perbedaan antara satu dengan lainnya menjadi tidak relevan lagi. Hal ini bukan berarti kosmopolitanisme ingin menghapus perbedaan yang sudah menjadi fitrah manusia. Akan tetapi, perbedaan itu tidak boleh menghalangi pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang dimiliki bersama. Seperti halnya pelangi yang walaupun terdiri atas berbagai macam warna, sebenarnya itu adalah hasil dari pemendaran warna putih.

Singkatnya, kosmopolitanisme menjunjung tinggi semangat solidaritas yang dibangun di atas prinsip kemanusiaan. Pandangan kosmopolitanisme ini bertentangan

dengan moral favoritism yang dibuat oleh J.J. Rousseau. Doktrin ini menyatakan bahwa sesuai dengan kewajiban hendaknya pemerintah suatu negara lebih memprioritaskan individu yang merupakan warga negara, ketimbang individu warga negara lain. Doktrin ini sesuai dengan praktik dalam hubungan internasional, dimana suatu negara mendahulukan kepentingan nasionalnya ketimbang kepentingan negara lain.

Dalam etika kosmopolitan, tindakan yang didasarkan pada moral favoritism ini tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan dapat menghalangi inklusivisme negara. Moral favoritism justru membuat dunia terbelah menjadi dua kelompok yakni in-group dan out-group. Abad-21 yang ditandai dengan arus globalisasi yang semakin intensif membuat doktrin ini menjadi tidak relevan. Interaksi antar bangsa semakin meningkat, seiring dengan berbagai masalah yang mengikutinya, turut mendorong negara untuk lebih terbuka dalam menyikapi perkembangan global. Dalam perkembangannya, kosmopolitanisme sendiri terbagi menjadi dua perdebatan; kosmopolitanisme versus komunitarianisme.

Keduanya pada dasarnya berpegang pada komitmen terhadap perluasan kebebasan individu dan kewajiban moral antar individu namun instrumen yang dipakai untuk mencapai suatu tujuan berbeda (Cochran 2004, 6). Kosmopolitanisme tidak percaya pada komitmen moral negara mengingat negara selalu bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri. Jalan keluar satu-satunya adalah melalui pemberdayaan individu yang terlepas dari sekat-sekat kedaulatan dan kepentingan nasional.

Pola "bottom-up" ini pada umumnya dipakai oleh aktor non-negara, seperti kelompok masyarakat sipil yang berupaya memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Charles Beitz (1979) misalnya, berangkat dari pemikiran John Rawls tentang konsep keadilan distributif tidak mempercayai negara sebagai agen moral. Pandangan bahwa negara adalah aktor otonom tidak menyediakan landasan yang memadai untuk komitmen moral apapun. Sebaliknya, komunitarianisme percaya bahwa negara masih menjadi aktor penting dalam memperjuangkan nilai-nilai moral.

Kelebihan yang dimiliki oleh negara dan tidak dimiliki aktor non-negara adalah kapasitasnya dalam proses pembuatan keputusan (Cochran 2004, 60). Negara juga berperan sebagai penjamin keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi individu. Distribusi barang publik masih menjadi privilege dan bagian yang tidak terpisahkan dari peran negara. Seperti pernyataan Andrew Linklater yang menyatakan bahwa universalisme moral setidaknya mengimplikasikan tiga kecenderungan negara, seperti: meningkatnya komitmen perlindungan terhadap hak asasi manusia, kebutuhan untuk melakukan tindakan kolektif dalam mengatasi masalah sosio-ekonomi dunia, serta kebutuhan untuk memperkuat komunitas dunia dalam menanggulangi dampak rasionalitas-instrumental (Cochran 2004, 89-90).

Dengan demikian, tugas pokok negara adalah membangun struktur kenegaraan yang mencita-citakan hubungan baru antara loyalitas nasional dan global (Linklater 2007, 21). Pasca Perang Dingin, banyak negara menerapkan pola "top-down" sebagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah global.

Seiring pembentukan berbagai macam rezim internasional yang memperhatikan isu tertentu seperti isu lingkungan hidup, kelaparan dan kemiskinan, demokratisasi, hak asasi manusia, kesetaraan jender, perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan, dan lain-

lain. Kompleksitas masalah global dalam meningkatkan kesadaran bangsa-bangsa di dunia untuk bersatu dalam upaya penanggulangannya. Negara tidak lagi memandang masalah-masalah tersebut sebagai masalah yang dihadapi oleh negara yang bersangkutan saja, melainkan masalah bersama. Kesadaran inilah yang mendorong terbentuknya kerjasama untuk mengatasi masalah bersama.

### 3. Threat (Ancaman)

Solidaritas internasional dalam upaya untuk membantu persoalan masyarakat di negara-negara miskin pada dasarnya banyak mendapat perhatian dari komunitas internasional. Mereka percaya bahwa kemiskinan dapat memicu ketidak-stabilan tatanan masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas sistem internasional secara keseluruhan. Negara-negara maju sangat paham dengan konsekuensi tersebut. Mereka juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat di negara-negara miskin. Negara maju merancang skema bantuan ekonomi yang dikenal dengan Official Development Assistant (ODA), sebagai bentuk upaya untuk menanggulangi persoalan kemiskinan yang terjadi di dunia. Program bantuan ekonomi tersebut dikelola bersama di bawah naungan Development Assistant Committee (DAC) yang terdiri dari negara-negara industri maju atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Paket-paket bantuan ekonomi ke negara-negara miskin dan berkembang semakin meningkat dari waktu ke waktu, didorong oleh komitmen moral bahwa “yang kaya harus membantu yang miskin”. Dalam sebuah laporannya, DAC menyebutkan bahwa pada tahun 2000 jumlah penduduk miskin di dunia semakin bertambah. Sebagai negara industri maju, mereka punya kewajiban moral yang kuat untuk merespon kemiskinan ekstrim dan krisis kemanusiaan yang terjadi pada lebih dari

satu milyar umat manusia (OECD 1996, 1). Solidaritas negara-negara maju terhadap kemiskinan di berbagai belahan dunia mendorong mereka melakukan upaya pembangunan ekonomi, guna mengangkat taraf hidup kelompok masyarakat miskin. Solidaritas tersebut merupakan solidaritas yang bersifat lintas-batas, yang tidak mengenal sekat-sekat kedaulatan dan kepentingan nasional negara yang sempit. Solidaritas global untuk menanggulangi masalah kemiskinan tidak terbatas pada komitmen negara-negara industri maju saja. Di tingkat global, PBB berinisiatif membentuk suatu program kerjasama di antara negara-negara anggota untuk membantu masyarakat miskin di berbagai belahan dunia.

### 4. Opportunities (Peluang)

Pada tanggal 3 April 2000, PBB meluncurkan program Millenium Development Goals dalam upaya mengatasi masalah-masalah global. Sekjen PBB Kofi Annan menyampaikan tulisannya yang berjudul “We the Peoples: The Role of the United Nations in the 21st Century” sebelum peluncuran program tersebut dilakukan. Tulisan tersebut berisi tentang masalah-masalah yang dihadapi dunia akibat arus globalisasi serta peran yang dilakukan oleh PBB dalam upaya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dalam tulisan tersebut, Kofi Annan juga menjelaskan bahwa di satu sisi banyak masyarakat dunia yang tengah menikmati kemakmuran, di sisi lain banyak juga masyarakat di belahan dunia lainnya yang mengalami masalah kemiskinan. Hampir separuh populasi dunia hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dolar per hari. Sekitar 1,2 miliar manusia (yang 500 juta jiwa tinggal di Asia Selatan dan 300 juta jiwa di Afrika) bertahan hidup dengan pendapatan kurang dari 1 dolar per hari (Annan 2000, 19). Data tersebut juga diperkuat dengan adanya kondisi deprivasi sosio-ekonomi seperti masalah pengangguran, kesenjangan atau

ketimpangan pendapatan, dan sebagainya. Kondisi-kondisi global tersebut tentu menjadi tantangan bagi PBB sebagai organisasi internasional. Dalam hal ini, MDGs merupakan program yang dibuat untuk mengatasi masalah-masalah global yang mencakup 8 isu low politics meliputi: 1) kemiskinan dan kelaparan, 2) pendidikan, 3) kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 4) mengurangi angka kematian bayi, 5) meningkatkan kesehatan ibu hamil, 6) memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, 7) masalah terkait lingkungan, dan 8) upaya pembangunan ekonomi. Meski demikian, isu yang paling menonjol dan menempati prioritas tertinggi program MDGs adalah isu kemiskinan. Kemiskinan merupakan isu krusial karena memiliki efek samping yang sangat luas, menyangkut isu-isu lainnya. Salah seorang yang turut menginisiasi MDGs, Jeffrey Sachs (2005, 226), menyatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah struktural. Dengan demikian, masyarakat di negara-negara miskin tetap miskin karena mereka menghadapi permasalahan yang membuat mereka sulit memperbaiki kehidupannya. Oleh karena itu, perubahan struktural melalui program bantuan MDGs dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jeffrey Sachs juga menyatakan bahwa ada beberapa hal yang membuat negara bebas dari masalah kemiskinan, seperti infrastruktur yang memadai, kedekatan dengan negara kaya, lingkungan yang mendukung, sumber daya energi yang memadai, serta bebas dari penyakit. Tanggung-jawab komunitas internasional adalah memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung terjadinya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pun juga harus mengedepankan asas pro-poor, bukan pro-capital. Sebagai wujud solidaritas global, MDGs menganjurkan agar komunitas internasional dapat bersatu untuk membantu masyarakat di negaranegara miskin. Kofi Annan (2000, 40) mengatakan bahwa komitmen dunia kepada kaum miskin bukan hanya sebuah bentuk kewajiban moral, melainkan juga kepentingan bersama. Semua pihak punya tanggungjawab utama guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan. Menghapus kemiskinan adalah tantangan bagi semua. Kita tidak boleh gagal dalam hal ini.

Kemiskinan dipandang sebagai perusak nilai-nilai kemanusiaan. Secara lebih lanjut Kofi Annan (2000, 77) juga mengatakan bahwa “kita harus membantu saudara-saudara kita yang tengah dilanda kemiskinan”. Dengan berpegang pada komitmen untuk membantu yang lemah, solidaritas ini dapat menjadi pelengkap bagi DAC dalam memberikan bantuan, guna mendorong pembangunan di negara dunia ketiga. Penanggulangan masalah kemiskinan global tidak dapat dilakukan oleh negara-negara kaya saja. Semua pihak, termasuk negara miskin (negara penerima bantuan) juga punya kewajiban untuk melakukan upaya-upaya perbaikan taraf hidup bagi warga negaranya. Target menghapus kemiskinan global pada 2025 mendatang memerlukan kerjasama global antara negara kaya dan negara miskin. Negara miskin diharapkan memprioritaskan sebagian besar sumber daya yang dimilikinya untuk mengatasi kemiskinan. Sedangkan negara kaya harus membantu mereka keluar dari jaring kemiskinan (Sachs 2005, 266). MDGs menyediakan kerangka kerjasama bagi pemerintah, baik di negara kaya maupun di negara miskin, untuk dapat bersatu dalam upaya mencapai tujuan MDGs pada tahun 2025. Kerangka kerjasama MDGs tersebut menunjukkan bahwa negara masih menjadi aktor penting dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan universal. Kewajiban mengurangi angka kemiskinan adalah kewajiban negara, bukan kewajiban masyarakat di negara tersebut (Priest 2005). Namun dalam hal ini, kewajiban moral dalam menanggulangi masalah kemiskinan melampaui batas-batas negara. Melalui upaya penerapan program MDGs,

dapat dilihat adanya bentuk empati komunitas internasional terhadap persoalan yang dihadapi oleh negara-negara lain. Komitmen moral ini mengikat negara-negara agar bekerjasama dalam membahas strategi penanggulangan kemiskinan global. Sejalan dengan argumen kosmopolitanisme, Jeffrey Sachs (2005, 226-227) menyatakan bahwa dalam upaya menanggulangi kemiskinan diperlukan kerjasama di antara “orang-orang yang tidak pernah bertemu sebelumnya dan tidak percaya antara satu dengan yang lain”. Ketika menghadapi masalah yang sama-kemiskinan global beserta ancaman-ancaman yang ditimbulkannya, negara-negara tidak lagi melihat kemiskinan dalam istilah kekuasaan maupun kepentingan nasional.

Kemiskinan sudah menjadi isu kolektif yang menyatukan perbedaan kepentingan antar negara. Salah satu dampak positif MDGs di luar konteks kemanusiaan adalah mampu menjadi “lem perekat” bagi negara-negara yang sebelumnya memiliki hubungan yang tidak harmonis. Persamaan persepsi terhadap nilai moral menyangkut isu kemiskinan global merupakan bukti bahwa sekalipun terdapat perbedaan dan pertentangan antar negara, mereka masih dapat bersatu untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi ancaman bersama. Sebagai sebuah tata-kelola global, MDGs dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan universal yaitu kebebasan, martabat, solidaritas, toleransi, dan kesetaraan antar umat manusia dan bangsa (Fukuda-Parr 2004, 395).

Akses terhadap sumber daya ekonomi untuk menuju kemakmuran merupakan nilai universal yang diakui oleh seluruh bangsa. Terlepas dari adanya perbedaan ras, etnis, maupun budaya. PBB mengakui nilai-nilai universal bahwa semua individu di manapun berada, bebas memiliki keinginan (*freedom from want*) dan bebas dari ketakutan (*freedom from fear*). Bebas dalam memiliki keinginan erat kaitannya dengan kesejahteraan ekonomi sedangkan bebas dari rasa takut berhubungan dengan aspek keamanan. Dalam konteks itu, kemiskinan dianggap sebagai penghalang bagi tercapainya kebebasan untuk memiliki. Peran PBB sebagai organisasi internasional sangat penting untuk mempermudah akses individu terhadap sumber daya ekonomi dapat terjamin sepenuhnya. Dalam konteks ini pula, peran negara sebagai agen moral dapat turut-serta mendukung upaya pencapaian kesejahteraan semua bangsa di dunia. Ketika suatu negara memutuskan bergabung dengan PBB, secara otomatis negara tersebut mengakui dan menjalankan norma atau aturan, serta nilai kemanusiaan universal yang tercantum dalam Piagam PBB. Dengan demikian, MDGs menjadi komitmen dan sebuah kesepakatan terbesar bagi negara-negara di dunia secara global, untuk mengurangi kemiskinan dan deprivasi kemanusiaan melalui tindakan kolaboratif yang belum pernah terjadi sebelumnya (Hulme 2009, 4). MDGs berbeda dengan komitmen global lainnya dalam hal keluasan aspek yang ditangani dan upaya sistematis dalam hal pembiayaan, implementasi, dan evaluasi. MDGs merupakan bentuk upaya pengurangan dan atau pemberantasan kemiskinan global, yang menjadi kewajiban moral bagi semua negara dan institusi internasional (Hulme dan Fukuda-Parr 2009, 3). Kolektivisme MDGs mencerminkan solidaritas mekanis antar bangsa yang diikat oleh kesamaan identitas sebagai “warga dunia”, serta kesamaan kepentingan untuk mewujudkan dunia yang bebas dari permasalahan. Menolong masyarakat di negara-negara miskin tidak lagi dipandang sebagai hasil kalkulasi rasional menyangkut untung-rugi, tetapi tanggung-jawab sosial negara (*states social responsibility*) dalam komunitas internasional.

Hingga saat ini, hanya sedikit pihak yang mengetahui perkembangan MDGs menjadi norma universal. Meskipun pada dasarnya semua pemerintah dan individu di dunia

sepakat bahwa kemiskinan merupakan permasalahan global yang harus diatasi bersama. Beberapa orang mungkin bertanya tentang bagaimana MDGs bisa menjadi tata-kelola global yang mampu mengikat semua negara di dunia? Mengapa baru sekarang-awal milenium ketiga ide tersebut muncul? Bukankah kemiskinan merupakan persoalan klasik? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengarah pada persoalan seputar bagaimana kemiskinan menjadi isu global dan tidak lagi menjadi hak eksklusif negara.

Dengan demikian, kemiskinan mengglobal hingga MDGs diinternalisasi oleh semua negara di dunia. Dalam sebuah artikel, Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink (1998) memberikan kerangka analisis untuk memahami bagaimana suatu norma muncul, menyebar, hingga diadopsi oleh aktor negara. Proses tersebut dikenal sebagai “daur hidup norma”. Dalam artikel tersebut juga dijelaskan mengenai proses pembentukan norma yang meliputi: fase kemunculan (*norms emergence*), penyebarluasan (*norms cascade*), dan internalisasi (*norms internalization*). Tahap-tahap tersebut berjalan secara linear sehingga tidak tepat disebut sebagai “*norms life cycle*”. Terlepas dari itu, bingkai analitis Finnemore dan Sikkink sangat bermanfaat untuk mengetahui pembentukan dan perkembangan norma MDGs. David Hulme dan Sakiko Fukuda-Parr (2009) membuat penelitian yang menerapkan kerangka yang dibuat Finnemore dan Sikkink. Dalam artikelnya, Hulme dan Fukuda-Parr menyebutkan bahwa terdapat dua alasan mengapa MDGs membawa sebuah perubahan besar dalam hal penanganan masalah kemiskinan global. Pertama, sebelum MDGs disepakati oleh seluruh negara di dunia, masalah kemiskinan tidak menjadi prioritas negara. Kedua, sebelum MDGs muncul, kemiskinan hanya dipandang secara monolitik, yaitu definisi miskin hanya dikaitkan dengan rendahnya pendapatan daripada multidimensi. Oleh sebab itu, kemunculan MDGs merupakan revolusi gagasan atau ide mengenai pentingnya membentuk tata-kelola global yang secara komprehensif mengatur pemberantasan kemiskinan di dunia. Tahap pertama diawali dengan proses kemunculan norma. Sebelum MDGs menjadi paradigma baru dalam upaya pemberantasan kemiskinan global, para aktor bekerja keras dalam mengkampanyekan program-program sosial. Aktor tersebut terdiri dari individu, aktivis-aktivis LSM, dan gerakan sosial yang dalam terminologi konstruktivis disebut dengan Jaringan Advokasi Transnasional (Keck dan Sikkink 1998; Khagram et al. 2001). Beberapa aktor tersebut antara lain UNICEF (lembaga internasional yang mengurus masalah anak-anak), UNFPA (lembaga internasional yang mengurus masalah pangan), dan ICWH (lembaga internasional yang mengurus masalah kesehatan perempuan).

Hingga pada akhirnya muncul upaya penyelesaian masalah kemiskinan dari pendekatan neoliberal yang dikenal dengan “program penyesuaian struktural” (*structural adjustment program*) ke pendekatan berbasis manusia (*people based approach*). Ketika pendekatan pemberantasan kemiskinan tersebut masuk ke ranah PBB, norma yang menjadi cikal-bakal MDGs tersebut menjadi dominan. Ini adalah tahap “*tipping point*” yaitu tahap ketika para pemimpin pemerintah atau lembaga menerima sebuah norma. Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, menulis laporan berjudul “*We the Peoples: The Role of the United Nations in the 21st Century*” yang mencerminkan penerimaan Majelis Umum PBB terhadap gagasan baru tersebut. Beberapa individu juga berperan dalam merinci tujuan-tujuan dari MDGs yang kemudian dicantumkan dalam sejumlah laporan.

Individu-individu tersebut berperan sebagai “*message entrepreneur*” -yang membedakan mereka dari “*norms entrepreneur*” karena tidak dimotivasi oleh komitmen idealis (Hulme dan Fukuda-Parr 2009, 15). Mereka hanya membantu menterjemahkan

“norma global” Millenium Development (MD) menjadi Millenium Development Goals (MDGs) yang lebih konkret. Beberapa individu yang terlibat dalam pembuatan MDGs dan juga dikenal sebagai pengembang studi hubungan internasional, seperti John Gerrard Rugie (konstruktivis) dan Michael Doyle (liberalis). Setelah norma MDGs diterima PBB, secara otomatis semua negara anggota PBB juga menerima norma tersebut. Hal ini berkaitan dengan tahap kedua dari proses perkembangan norma dari kerangka analisis Finnemore dan Sikkink yakni penyebarluasan. Proses penyebarluasan norma MDGs oleh negara-negara anggota PBB relatif mudah. Setelah itu, norma MDGs mengalami internalisasi dan diadopsi menjadi agenda kebijakan nasional masing-masing negara anggota PBB. Pada tahap ketiga ini MDGs diadopsi dalam produk-produk kebijakan nasional seperti pernyataan kebijakan pemerintah, dokumentasi, dan laporan pemerintah. Dengan diadopsinya norma MDGs oleh semua negara maka semua negara memiliki persepsi dan komitmen yang sama dalam melihat kemiskinan sekaligus cara untuk menanggulangnya.

## **KESIMPULAN**

1. Pemikiran konvensional melihat fenomena global sebagai tempat di mana kekuasaan dan kepentingan nasional sebuah negara dapat dicapai. Namun, ada aspek moral yang dapat memengaruhi orang dan negara saat merasakan dampak kemiskinan yang dialami oleh masyarakat di luar negeri. Moralitas ini berasal dari nilai dan norma kemanusiaan universal yang diterima dan dianut oleh orang dari seluruh dunia, terlepas dari ideologi, ras, etnis, atau budaya.
2. Setiap negara percaya bahwa kemiskinan menghambat kesejahteraan dan kemakmuran. Dalam diskusi modern tentang hubungan internasional, aspek etis dari kosmopolitan sering kali diabaikan.
3. Pada akhirnya, prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Millenium Development Goals mampu menggantikan praktik neoliberal konvensional. Terbukti bahwa pendekatan neoliberal tidak dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Sebagai program untuk memerangi kemiskinan, Millenium Developments Goals menekankan penggunaan pendekatan berbasis kemanusiaan. Agenda Millennium Development Goals menggambarkan komitmen itu.
4. Komitmen kosmopolitanisme yang ditunjukkan oleh Millennium Development Goals memberikan bukti kuat yang menunjukkan bahwa negara dapat bertindak sebagai tindakan moral yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di seluruh dunia. Mereka juga memperkuat gagasan kosmopolitan bahwa, di balik segala perbedaan yang sering menyebabkan konflik antar negara, ada dimensi etis yang dapat mempersatukan, yaitu nilai-nilai seperti kebebasan, kesetaraan, martabat, toleransi, dan solidaritas. Dalam upaya memerangi kemiskinan di seluruh dunia, Millenium Development Goals telah berkembang menjadi platform kerja sama yang memungkinkan negara-negara bekerja sama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Indrayati, A. (2011). Pola Distribusi Keruangan MCK Komunal dan Hubungannya dengan Kawasan Kumuh di Perkotaan Yogyakarta. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan ...* <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JG/article/view/1656>
- Khairina, E., Purnomo, E. P., & ... (2020). Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan ...* <https://journal.ugm.ac.id/jkn/article/view/52969>
- Sari, R., & Halim, C. (2022). Analisis Strategi Bisnis Guna Meningkatkan Daya Saing pada Coffee

- Shop di Bandar Lampung (Studi Kasus Dr. Coffee). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/ministal/article/view/1139>
- Sari, S. (2015). PERAN UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) DALAM MEWUJUDKAN MILLENIUM D EVELOPMENT GOALS (MDGs) 2015. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM. <https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/30693>
- Yusuf, A. A. (2018). Keadilan untuk Pertumbuhan. books.google.com. [https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=zy1xDwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PR5%5C&dq=pola+pembangunan+ekonomi+dan+hubungannya+dengan+mdgs%5C&ots=N\\_vK4VxXFU%5C&sig=Qqdi6qPJWGYgepfSW530\\_rZgnt8](https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=zy1xDwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PR5%5C&dq=pola+pembangunan+ekonomi+dan+hubungannya+dengan+mdgs%5C&ots=N_vK4VxXFU%5C&sig=Qqdi6qPJWGYgepfSW530_rZgnt8)